

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



## SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

Jl. Jenderal Sudirman, Ramanuju Kec. Purwakarta  
Kota Cilegon, Banten 42431



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke- IV pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja



seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cilegon pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Cilegon, Februari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA  
CILEGON



**TB. H. HERI MARDIANA**  
NIP. 19690918 199803 1 003



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke- IV pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja



seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cilegon pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Cilegon, Februari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA  
CILEGON



**TB. H. HERI MARDIANA**  
NIP. 19690918 199803 1 003



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD Kota Cilegon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate



sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kota Cilegon diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengarahan kegiatan penyusunan rencana operasional di lingkup Sekretariat DPRD dengan menjabarkan rencana operasional Sekretariat DPRD berdasarkan standar operasional prosedur dan

rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat DPRD sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. pengendalian tugas lingkup Bagian Umum, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Layanan DPRD, dan Bagian Fasilitasi Fungsi DPRD, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup Sekretariat DPRD;
- e. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkup Bagian Umum, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Layanan DPRD, dan Bagian Fasilitasi Fungsi DPRD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban; dan;

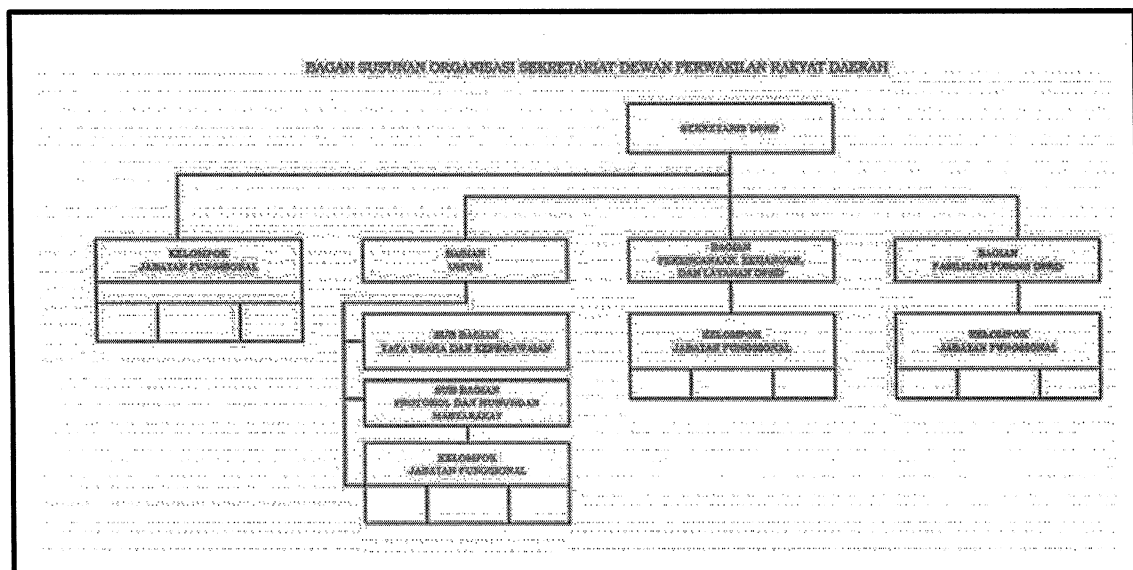


j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Sekretaris DPRD Kota cilegon sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Fasilitas Fungsi DPRD dan Kabag. Perencanaan, Keuangan dan Layanan Administrasi DPRD serta dibantu Kasubag dan Jabatan Fungsional Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Cilegon.

Gambar 1.1.

### Struktur Organisasi



## B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Cilegon periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Tuntutan terhadap pelayanan yang profesional dan berkualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Cilegon;
2. Tuntutan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD Kota Cilegon.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Cilegon periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Tuntutan terhadap pelayanan yang profesional dan berkualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Cilegon;
2. Tuntutan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD Kota Cilegon.

### **C. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 12 Tahun 23 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 343 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cilegon adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cilegon Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cilegon Kabupaten/Kota dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Cilegon Kabupaten/Kota tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Cilegon Kabupaten/Kota telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kota

Cilegon Kabupaten/Kota merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kota Cilegon Kabupaten/Kota dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kota Cilegon Kabupaten/Kota tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Cilegon Kabupaten/Kota dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Cilegon.

Visi Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 adalah:

**"Mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat"**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Cilegon mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

**Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel**

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat DPRD Kota Cilegon Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Sekretariat DPRD Kota Cilegon**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	22,04	23,04	24,04	25,04	26,04
		1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan	Nilai Lakip Perangkat Daerah	65,57	66,57	67,57	68,57	69,57

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur						
				Survey Layanan Sekretariat DPRD	73	75	80	83	85

*Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kota Cilegon periode 2021-2026*

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Cilegon tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat DPRD Kota Cilegon**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur	1.1. Indeks Reformasi Birokrasi	Point	Hasil Penilaian dari Evaluator (Inspetorat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dinilai setiap tahun oleh KemenPAN RB dengan Komponen Pengungkit 60% dan Hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data n-1)	Restra Sekretariat DPRD
		2.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah	Point	Hasil Penilaian dari Evaluator (Inspetorat)	Nilai LAKIP Perangkat Daerah dinilai setiap tahun oleh APIP dengan Komponen Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%) (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data n-1)	Restra Sekretariat DPRD
		3.1 Survey Layanan Sekretariat DPRD	Point	Hasil Survey kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Survey dilakukan kepada anggota DPRD untuk mengetahui persepsi anggota DPRD terhadap kualitas Layanan Sekretariat DPRD, berdasarkan indikator :	Restra Sekretariat DPRD



						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan SDM;</li> <li>- Pelayanan Alat Kelengkapan;</li> <li>- Pelayanan Kesehatan;</li> <li>- Penyediaan Sarana dan Prasarana;</li> <li>- Pelayanan Khumasan dan Keprotokolan;</li> <li>- Pelayanan Persidangan dan Risalah;</li> <li>- Pelayanan Bagian Perundang-undangan dan Kajian; dan</li> <li>Pelayanan Bagian Keuangan</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024*

## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Sekretariat DPRD Kota Cilegon**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas Layanan Pemerintahan	1.1	Meningkatnya kualitas Layanan Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	24,04
				Nilai Lakip Perangkat Daerah	Point	67,57
				Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Point	80

*Sumber : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon tahun 2024*

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi

akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon**  
**Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintahan dan Profesional Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	24,04
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Point	67,57
		Survey Layanan Sekretariat DPRD	Point	80

*Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Cilegon :

Tabel 2.5

## Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	24,04 Point	69.888.179.996,00
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	67,57 Point	
1.	Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	405.545.784,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	10.793.247.043,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.994.560.000,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.264.712.167,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.492.248.168,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	5.218.761.751,00

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.282.464.996,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.275.831.775,00
9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	31.956.034.142,00
10.	Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100%	204.774.170,00
<b>B.</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Survey Layanan Sekretariat DPRD</b>	<b>80 Point</b>	<b>49.636.315.004,00</b>
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	7.975.000.000,00
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	6.925.729.728,00
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	12.577.829.000,00
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	9.836.310.304,00



5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3.302.959.466,00
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	1.031.961.000,00
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	7.986.525.506,00

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (dipilih point 1 s.d. 3) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon  
Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	65
		Nilai Lakip	Point	66,57
		Nilai Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Point	80

*Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024*

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

**Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Cilegon  
Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	- Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai Lakip - Nilai Survey Kepuasan Layanan	65  66.57 80	69.888.179.996,00

		Sekretariat DPRD		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai Lakip - Nilai Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	65  66.57 80	49.636.315.004,00

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)*

# **BAB III**

---

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota Cilegon Kabupaten/Kota selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Cilegon.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara



penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Cilegon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Cilegon.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kota Cilegon juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Cilegon tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	65	90	138%	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
		Nilai Lakip	66,57	52,94	80%	Sedang	Sekretariat DPRD
		Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	80	80,09	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa indikator yang kami tetapkan diawal periode anggaran dapat tercapat dengan baik sesuai harapan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	23,04	23,04	100%	65	90	138%
		Nilai Lakip	66,57	66,57	100%	66,57	52,94	80%
		Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	75	78	104%	80	80,09	100%

Uraian penjelasan tabel :

Dari table diatas dapat dilihat adanya peningkatan target dan juga capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kota Cilegon periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	90	26,04	346%
		Nilai Lakip	52,94	69,57	76%
		Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	80,09	85	94%

Uraian penjelasan tabel :

Dari table diatas dapat kami jelaskan bahwa target indikator kinerja reformasi birokrasi yang pada tahun 2024 sebesar 90 point pada tahun 2026 di targetkan sebesar 26,04 point hal ini dikarenakan pada tahun 2024 capaian reformasi birokrasi sudah mencapai point 90 sedangkan untuk indikator yang lain targetnya masih sesuai target yang tercantum di dalam rentra Sekretariat DPRD.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	90		
		Nilai Lakip	52,94		
		Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	80,09		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	65	90	138%	Meskipun capaian indeks reformasi mencapai 100% dari target tetapi kami masih perlu banyak melakukan perbaikan terutama terkait keterbukaan informasi ke publik	Mengoptimalkan peran sosial media dan website Sekretariat DPRD



		Nilai Lakip	66,57	52,94	80%	Meskipun capaian indeks reformasi mencapai 100% dari target tetapi kami masih perlu banyak melakukan perbaikan	Mengoptimalkan peran sosial media dan website Sekretariat DPRD
		Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	80	80,09	100%	Capaian hasil sebesar 104 % dikarenakan dalam memberikan fasilitas kepada pimpinan dan Anggota DPRD kami lakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi selalu berdasarkan dan mematuhi setiap peraturan perundang undangan yang berlaku

Uraian penjelasan tabel :

Dilihat dari tabel diatas bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD telah berhasil sesuai yang di targetkan pada awal periode tahun 2024 meskipun masih perlu perbaikan terutama dalam hal keterbukaan informasi ke publik, pembuatan web aplikasi pokir DPRD.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	138%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	138%	
		Nilai Lakip	80%		Nilai Lakip	80%	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan	100%	

					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	Menunjang
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	Menunjang
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	Menunjang
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	100%	Menunjang

					Disediakan		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan	100%	

					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	Menunjang
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	100%	Menunjang
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	100%	Menunjang
				Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100%	
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100%	Menunjang
		Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	100%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	100%	
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	

				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100%	Menunjang
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	100%	Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100%	Menunjang
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen penyusunan tata tertib	100%	Menunjang
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100%	Menunjang
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	Menunjang
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100%	Menunjang
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100%	Menunjang
				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	100%	Menunjang
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100%	Menunjang
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan	100%	

					Pemerintahan		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	Menunjang
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	Menunjang
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100%	Menunjang
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	Menunjang
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100%	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100%	Menunjang
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100%	Menunjang
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	100%	Menunjang
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	100%	Menunjang
				Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	100%	Menunjang

				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100%	Menunjang
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	Menunjang
				Fasilitasi Tugas DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	Menunjang
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	100%	Menunjang
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100%	Menunjang
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100%	Menunjang

### **Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel diatas dapat dilihat kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam capaian program Sebagian besar sub kegiatan yang ada sangat mendukung dalam capaian kinerja program pada Sekretariat DPRD.



## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	69.888.179.996,00	61.986.174.341,00	88,69
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405.545.784,00	224.341.900,00	55,32
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.793.247.043,00	9.667.059.756,00	89,57
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.994.560.000,00	2.777.788.380,00	92,76
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.264.712.167,00	816.407.000,00	64,55
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.492.248.168,00	4.761.391.056,00	86,69
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.218.761.751,00	3.593.520.500,00	68,86
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.282.464.996,00	4.762.286.613,00	90,15
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.275.831.775,00	4.329.182.680,00	68,98
9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.956.034.142,00	30.921.796.456,00	96,76
10.	Layanan Administrasi DPRD	204.774.170,00	132.400.000,00	64,66
<b>B.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	49.636.315.004,00	41.021.087.208,00	82,64
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.975.000.000,00	6.785.123.207,00	85,08

2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	6.925.729.728,00	6.099.534.332,00	88,07
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12.577.829.000,00	9.750.646.322,00	77,52
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	9.836.310.304,00	8.005.558.299,00	81,39
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.302.959.466,00	2.691.265.000,00	81,48
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.031.961.000,00	823.110.600,00	79,76
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	7.986.525.506,00	6.865.849.448,00	85,97

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1.	Peningkatan layanan Pemerintah							
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur							
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	90	138%				
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	66,57	52,94	80%	69.888.179.996,00	61.986.174.341,00	89%	110%
	Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	80	80,09	100%	49.636.315.004,00	41.021.087.208,00	83%	118,12%

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

1. Pada indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah dengan target awalnya sebesar 66.57 Point sedangkan hasil yang dicapai/realisasinya sebesar 52.94 point dengan persentase capaian sebesar 80%. Dari target anggaran sebesar Rp. 69.888.179.996,00 dan realisasinya sebesar Rp. 61.986.174.341,00 dengan persentase capaian 89% dan tingkat efisiensinya adalah 1.10 atau efisien.

2. Pada indikator Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD dengan target awalnya sebesar 80 Poin sedangkan hasil yang dicapai /realisasinya sebesar 80,09 poin dengan persentase capaian sebesar 100%. Dari target anggaran sebesar Rp. 49.636.315.004,00 dan realisasinya sebesar Rp. 41.021.087.208,00 dengan persentase capaian 100% dan tingkat efisiensinya adalah 1.00 atau efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>100</b>	<b>97,65</b>	<b>98%</b>	<b>69.888.179.996,00</b>	<b>61.986.174.341,00</b>	<b>89%</b>	<b>110%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	405.545.784,00	224.341.900,00	55%	181%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	89,99	90%	10.793.247.043,00	9.667.059.756,00	90%	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%	2.994.560.000,00	2.777.788.380,00	93%	107,80%

4	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	100	97,33	97%	1.264.712.167,00	816.407.000,00	65%	150,78%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	97,71	98%	5.492.248.168,00	4.761.391.056,00	87%	112,71%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	5.218.761.751,00	3.593.520.500,00	69%	145,23%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	96	96%	5.282.464.996,00	4.762.286.613,00	90%	106,49%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	6.275.831.775,00	4.329.182.680,00	69%	144,97%
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	97,33	97%	31.956.034.142,00	30.921.796.456,00	97%	100,59%
10	Layanan Administrasi DPRD	100	100	100%	204.774.170,00	132.400.000,00	65%	154,66%
<b>B.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>100</b>	<b>97,62</b>	<b>98%</b>	<b>49.636.315.004,00</b>	<b>41.021.087.208,00</b>	<b>83%</b>	<b>118,12%</b>
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	100	100%	7.975.000.000,00	6.785.123.207,00	85%	117,54%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	95,83	96%	6.925.729.728,00	6.099.534.332,00	88%	108,81%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100%	12.577.829.000,00	9.750.646.322,00	78%	128,99%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	100%	9.836.310.304,00	8.005.558.299,00	81%	122,87%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	87,5	88%	3.302.959.466,00	2.691.265.000,00	81%	107,39%
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	100	100%	1.031.961.000,00	823.110.600,00	80%	125,37%
7	Fasilitasi Tugas DPRD	100	100	100%	7.986.525.506,00	6.865.849.448,00	86%	116,32%

Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel diatas terlihat efisiensi program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD kota Cilegon, mengingat pentingnya mengevaluasi kinerja setiap program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran untuk memastikan bahwa sasaran tercapai dengan efektif. Berikut ini

penjelasan program dan kegiatan berikut persentase efisiensinya adalah :

1. Program penunjang urusan pemerintahan dengan 2 (dua) indicator yaitu Indeks RB Perangkat Daerah dan Nilai LAKIP Perangkat Daerah dengan tingkat efisiensi 1.38 dengan dukungan kegiatan dan tingkat efisiensinya sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tingkat efisiensi 1.81;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.00;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.07;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.50;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah tingkat efisiensi 1.12;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tingkat efisiensi 1.45;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tingkat efisiensi 1.06;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tingkat efisiensi 1.44;
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD tingkat efisiensi 1.00;
- Layanan Administrasi DPRD tingkat efisiensi 1.54.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan indicator Survey kepuasan Layanan Sekretariat DPRD dengan tingkat efisiensi 1.18 dengan dukungan kegiatan dan tingkat efisiensi sebagai berikut :

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tingkat efisiensi 1.17;
- Pembahasan Kebijakan Anggaran tingkat efisiensi 1.08;

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat efisiensi 1.28;
- Peningkatan Kapasitas DPRD tingkat efisiensi 1.22;
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tingkat efisiensi 1.07;
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD tingkat efisiensi 1.25;
- Fasilitasi Tugas DPRD tingkat efisiensi 1.16

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Cilegon menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur terdiri dari 3 indikator.
- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kinerja dengan capaian kinerja sebesar 138% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur terdiri dari Nilai Lakip Perangkat Daerah indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 80% (kategori Baik)



- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur terdiri dari Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 119.524.495.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 103.007.261.549,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 86,18% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 13,82%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Cilegon, Februari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA  
CILEGON

  
**TB. H. HERI MARDIANA**  
NIP. 19690918 199803 1 003

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Cilegon menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur terdiri dari 3 indikator.
- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kinerja dengan capaian kinerja sebesar 138% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur terdiri dari Nilai Lakip Perangkat Daerah indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 80% (kategori Baik)

- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur terdiri dari Nilai survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 119.524.495.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 103.007.261.549,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 86,18% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 13,82%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cilegon kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Cilegon, Februari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA  
CILEGON



TB. H. HERI MARDIANA  
NIP. 19690918 199803 1 003





**PEMERINTAH KOTA CILEGON**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jalan Jend. Sudirman No. 1 Telp. : (0254) 374270  
**C I L E G O N**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR : 050/Kep. 35 /2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CILEGON

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat daerah yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented) yang dapat dilihat dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka pandang perlu membentuk Tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Cilegon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 13);
6. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon;
7. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

KEDUA ...

KEDUA : Tugas Pokok Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

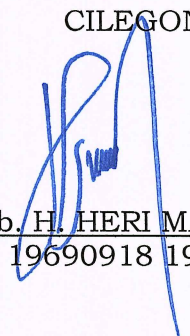
1. Menyiapkan agenda kegiatan penyusunan Laporan
2. Menghimpun berkas-berkas terkait penyusunan Lakip
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
4. Membuat laporan hasil kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan bila diperlukan.

Ditetapkan di Cilegon  
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA  
CILEGON

  
Tb. H. HERI MARDIANA  
NIP. 19690918 199803 1 001

Lampiran  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
NOMOR : 050/Kep. 35 /2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN  
2024 PADA SEKRETARIAT DPRD  
KOTA CILEGON

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

Penanggung Jawab : Sekretaris DPRD

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Layanan DPRD

Sekretaris : Perencana Ahli Muda


Anggota : Kabag. Umum Sekretariat DPRD

Kabag. Fasilitasi tugas dan Fungsi DPRD

Analisis Kebijakan pada Sekretariat DPRD

Fungsional Umum Bagian Perencanaan, Keuangan dan Layanan DPRD

SEKRETARIS DPRD KOTA CILEGON

  
Tb. H. HERI MARDIANA  
NIP. 19690918 199803 1 001



**PEMERINTAH KOTA CILEGON**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jalan Jend. Sudirman No. 1 Telp. : (0254) 374270  
**C I L E G O N**

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR : 050/Kep. 35 /2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CILEGON

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat daerah yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented) yang dapat dilihat dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka pandang perlu membentuk Tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Cilegon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 13);
6. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon;
7. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 61);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

KEDUA ...

KEDUA : Tugas Pokok Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan agenda kegiatan penyusunan Laporan
2. Menghimpun berkas-berkas terkait penyusunan Lakip
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
4. Membuat laporan hasil kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan bila diperlukan.

Ditetapkan di Cilegon  
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA CILEGON



Tb. H. HERI MARDIANA  
NIP. 19690918 199803 1 001

Lampiran  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
NOMOR : 050/Kep. 35 /2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN  
2024 PADA SEKRETARIAT DPRD  
KOTA CILEGON

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

Penanggung Jawab : Sekretaris DPRD

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Layanan DPRD

Sekretaris : Perencana Ahli Muda

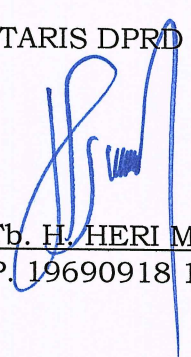
Anggota : Kabag. Umum Sekretariat DPRD

Kabag. Fasilitasi tugas dan Fungsi DPRD

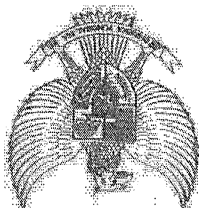
Analisis Kebijakan pada Sekretariat DPRD

Fungsional Umum Bagian Perencanaan, Keuangan dan  
Layanan DPRD

SEKRETARIS DPRD KOTA CILEGON



Tb. H. HERI MARDIANA  
NIP. 19690918 199803 1 001



**WALI KOTA CILEGON  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON**

**NOMOR : 060/Kep.287/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026**

**WALI KOTA CILEGON,**

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cilegon 2021-2026 serta dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Cilegon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

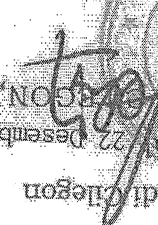


3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cillegon Tahun 2021, Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cillegon Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN ...

# MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Utama Kinerja Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
  - KEDUA : Indikator kinerja pada Lampiran I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Wali Kota.
  - KETIGA : Indikator kinerja pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
  - KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 22 Desember 2021  
Wali Kota Cilegon,  
  
HELDDY AGUSTIAN

Terbaca:

- 1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
- 2. Yth. Inspektur Kota Cilegon
- 3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 060/Kep.287/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

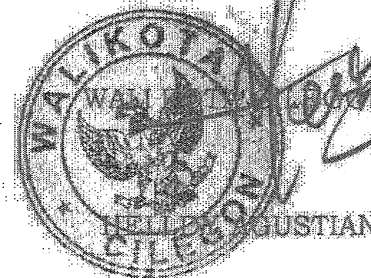
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	Poin	Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementerian PANRB dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan IPM Inkesra (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan IPM Inkesra (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)
4.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	Persen	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1
		Tingkat pengangguran terbuka	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Jika Publikasi BPS terkait Sakernas Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1

NO ...

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
5.	Meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Indeks kebahagiaan	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR : 060/Kep.287/2021  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan profesionalitas aparat	Indeks Peringkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APJP setiap tahun dengan komposisi pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	
		Nilai lalup Peringkat Daerah	Poin	Nilai lalup yang dinilai setiap tahun oleh APJP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 %, dan evaluasi internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	
		Persentase Progress Capaian Roadmap Reformasi Birokrasi	%	Rata-rata capaian indikator sasaran roadmap Reformasi Birokrasi terhadap Target Akhir Road Map	
		Tingkat Kepuasan layanan keprotokolan (Bagian Protokol)	%	Hasil survey kepuasan kemantaban layanan keprotokolan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
		Indeks Tata Kelola Berang dan Jasa (Bagian Beras)	Poin	Penilaian aspek kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ ( bobot 50 % ) dan tingkat kemandirian UKPBJ (bobot 50%)
		Persentase Undak lanjut hasil money permasalahan Grup Administasi Peta Pemerintahan	%	Jumlah Undak lanjut hasil money yang diundaklanjuti dibagi temuan money x 100 %
		Persentase Undak lanjut hasil money permasalahan Inetkup eksda (sebelah)	%	Jumlah Undak lanjut hasil money yang diundaklanjuti dibagi temuan money x 100 %
		Persentase Undak lanjut hasil money permasalahan Inetkup Kesos dan Kerta	%	Jumlah Undak lanjut hasil money yang diundaklanjuti dibagi temuan money x 100 %
		Persentase Undak lanjut hasil money permasalahan Program (Adper)	%	Jumlah Undak lanjut hasil money yang diundaklanjuti dibagi temuan money x 100 %
		Rata-Rata Pencapaian Kinerja Pelayanan Mekum Mekum dan HMM	%	Rata-rata dari persentase capaian kinerja pelayanan, bentuk ditambah persentase capaian kinerja produk, hukum ditambah persentase capaian kinerja dokumentasi produk hukum

B. INSPEKTORAT ...

## B. INSPEKTORAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lalap Perangkat Daerah	Poin	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		
		Indeks RB Perangkat Daerah	Level	Nilai lalip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)		
				Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)		
				Capaian Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Resiko Berdasarkan 7 Parameter :		
				NO	ELEMEN	BOBOT
				A	KAPABILITAS	60.00%
				I	KEPEMIMPINAN	10.00%
				II	KEBLAKAKAN MANAJEMEN RISIKO	10.00%
				III	SUMBER DAYA MANUSIA	10.00%
				IV	KEMITRAAN	5.00%
		V	PROSES MANAJEMEN RISIKO	25.00%		
B	HASIL	40.00%				
VI	AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	25.00%				
VII	OUTCOMES	15.00%				
C	TOTAL (KAPABILITAS + HASIL)	100.00%				
D	MANAJEMEN RISIKO INDEKS (TOTAL NILAI X 5)	5				
Indeks Kapabilitas APIP	Level	Hasil Capaian Indeks Kapabilitas APIP berdasarkan 6 elemen Penilaian meliputi : 1. Peran dan Layanan APIP; 2. Pengelolaan SDM; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi; 6. Struktur Tata Kelola.				

C. SEKRETARIAT ...

C. SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APJP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APJP setiap tahun dengan komponen, pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Perangkat Daerah	Poin	Survei dilakukan kepada anggota DPRD untuk mengetahui persepsi anggota DPRD terhadap kualitas layanan Sekretariat DPRD, Berdasarkan indikator :
		Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Poin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan SDM;</li> <li>- Pelayaman Alat Kelengkapan;</li> <li>- Pelayanan Kesehatan;</li> <li>- Penyediaan Sarana dan Prasarana;</li> <li>- Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolary;</li> <li>- Pelayanan Persidangan dan risalah;</li> <li>- Pelayanan Bagian Perundang-undangan dan kajian; dan</li> <li>- Pelayanan bagian keuangan</li> </ul>

D. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
				PENJELASAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan profesionalitas aparatur	Indeks Peringkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lalup Perangkat Daerah	Poin	Nilai lalup yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Perencanaan	%	Persentase hasil keselarasan, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan kota
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	Persentase hasil keselarasan, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan sektoral
2.	Meningkatnya Budaya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah dinilai setiap tahun oleh Kemendagri yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

E. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Pengelolaan Keuangan	Poin	Hasil Pengukuran atas 6 Dimensi Pengelolaan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun n terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun n-1. Formulasi = $\frac{(X_n - X_{n-1})}{X_{n-1}} \times 100\%$ Keterangan : $X_n$ = Realisasi PAD Tahun n $X_{n-1}$ = Realisasi PAD Tahun (n-1)

F. BADAN ...

F. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APJP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Jalap Perangkat Daerah	Poin	Nilai Jalap yang dinilai setiap tahun oleh APJP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengungkutan kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan evaluasi internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Poin	Indeks Merit System; Akumulasi atau jumlah dari skor/nilai dari lima penilai mandiri yang telah diverifikasi oleh KASN, dari aspek-aspek di bawah ini, sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 : - perencanaan kebutuhan (10%) - pengadaan (10%) - pengembangan karir (30%) - promosi dan mutasi (10%) - manajemen kinerja (20%) - pengujian, penghargaan dan disiplin (10%) - perlindungan dan pelayanan (4%) - sistem informasi (6%)
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Jumlah total hasil penilaian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator (cara cara detail berdasarkan Peraturan EKN Nomor 8 Tahun 2019)



G. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Mewujudkan kondusivitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	Berdasarkan hasil penilaian dari BPS (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)

H. BADAN ...



H. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalitas pemerintah profesionalitas aparat	Indeks Peringkat Daerah Nilai Peringkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APJP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1) Nilai setiap yang dinilai setiap tahun oleh APJP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, laporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kelengkapan bencana	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%  %	Jumlah Aparatur yang menangani urusan bencana ditambah jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dibagi jumlah aparat yang menangani urusan bencana dan jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%  Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana x 100%

I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan ruang dan infrastruktur kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses air Minum yang Layak dan Aman	Persen	Jumlah Rumah tangga Yang mendapat akses air minum (jaringan perpipaan ditambah bukan jaringan perpipaan ditambah mata air terlindungi ditambah sumber lainnya (sungai, waduk, irigasi dan tanki) dibagi Jumlah total rumah tangga dikali Seratus persen.
		Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dibagi dengan jumlah total rumah tangga di kota Cilegon dikali seratus persen
		Rasio Kepatuhan Perizinan Bangunan Gedung	Persen	Jumlah bangunan yang memiliki Perizinan Bangunan Gedung dibagi Jumlah bangunan yang ada di kota cilegon dikali Seratus persen
		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat (operator, teknisi, analis) dibagi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang ada wilayah kota cilegon dikali Seratus persen.
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	Luas pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukan dibagi Luas total lahan kawasan budidaya dikali Seratus persen.
		Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	Panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (km) (termasuk bangunan pelengkap) dibagi panjang seluruh jalan kota (km) dikali Seratus persen.
3.	Mewujudkan kota yang bebas banjir	Persentase Penanganan Banjir	Persen	Luas banjir atau genangan yang ditangani dibagi Luas seluruh banjir atau genangan (SK) dikali Seratus persen.

J. DINAS ...

J. DINAS PENDIDIKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
				PENJELASAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks Peringkat Daerah Nilai Lajap Peringkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APJP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1) Nilai lajap yang dinilai setiap tahun oleh APJP dengan komponen Perencanaan Kinerja 30 %, pengukuatan kinerja 25 %, Pelaporan Kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata	Rata-Rata pencapaian kinerja SMP Pendidikan Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Diterapkan Proporsi Pendidik Yang telah lulus Sertifikasi Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	Persen Dokumen Persen Persen Persen	(APM kesetaraan/target APM kesetaraan + APM PAUD/target APM PAUD +APM SD/target SD + APM SMP/target APM SMP/4)*100% Jumlah kurikulum muatan lokal pada jenjang SD ditambah jenjang SMP ditambah jenjang PAUD Jumlah pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP yang telah bersertifikat sebagai pendidik dibagi jumlah seluruh pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP x 100% Jumlah sekolah PAUD, SD dan SMP yang memiliki izin dibagi jumlah seluruh sekolah PAUD, SD dan SMP x 100% (Jumlah siswa PAUD, SD dan SMP yang belajar bahasa daerah dibagi jumlah penduduk usia 5 - 15 tahun) x 100%

K. DINAS KESEHATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatnya	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APJP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Jalap Berangkat Daerah	Poin	Nilai Jalap yang dinilai setiap tahun oleh APJP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Puskesmas dan RSUD)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) Pelayanan Puskesmas dan RSUD yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Reformasi RB Nomor 14 tahun 2017. (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu	Pada-Pada pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	Persen	Jumlah total nilai keseluruhan kinerja SPM Bidang Kesehatan di bagi jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan dikali 100 Persen

L. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APF setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakiip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakiip yang dinilai setiap tahun oleh APF dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kearsipan	Poin	Indeks kearsipan adalah Nilai yang diperoleh dari hasil Audit kearsipan yang dilakukan oleh Lembaga Nasional Pusat (ANRP) melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penyelamatan arsip sesuai prosedur	Persen	Jumlah perangkat daerah yang melakukan penyelamatan arsip sesuai prosedur dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali seratus persen
2.	Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	data dan informasi tentang tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif atas unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan budaya literasi masyarakat
		Jumlah Naskah Kuno yang di Akuisisi/dialih media/ digitalisasi/terdaftar yang ada di wilayah Kota Cilegon	Naskah	

M. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 %. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 %. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	%	$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <p>Ket :            Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah            X<sub>t</sub> = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu            X / t - 1 = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya</p>
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	<p>Memakai Perhitungan IKLH Kota =</p> $(IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$ <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kualitas Air (IKA)</li> <li>- Indeks Kualitas Udara (IKU)</li> <li>- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)</li> </ul>



N. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RE Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Laki Perangkat Daerah	Poin	Nilai laki yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	Persen	<p>Persentase penanganan pengaduan yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak yang diajukan korban berada pada rentang 0 s.d. 100</p> <p>Jumlah Anak korban kekerasan yang ditangani intansi terkait kota ( UPTD PPA ) dibagi jumlah anak yang mengalami korban kekerasan yang melaporkan ke instansi kota dikali seratus persen</p>
		Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	Persen	<p>Pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian</p> <p>Akumulasi Jumlah Kelahiran Hidup dikurangi jumlah kematian penduduk sepanjang tahun n dibagi jumlah penduduk pada awal tahun n</p>
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	<p>Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan Per 100.000 Jumlah Penduduk Perempuan</p> <p>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan x 100.000</p>
		Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	Persen	<p>Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha perempuan yang meningkat skala usahanya</p> <p>Jumlah pelaku usaha yang dibina di Kota Cillegon dibagi jumlah pelaku usaha perempuan yang ada x 100%</p>

O. DINAS ...

O. DINAS SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalitas aparatur	Indeks Peringkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APJP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 % hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Laki Peringkat Daerah	Poin	Nilai laki yang dinilai setiap tahun oleh APJP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan evaluasi internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OKD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (KAM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Formulir RB Nomor 14 tahun 2017. (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persen	Jumlah persentase jenis PPKS yang ditangani dibagi jumlah jenis PPKS Kota yang ada dikali seratus persen $\text{Persentase} = \frac{\sum X_i}{n} \times 100\%$ $X_i : \text{Persentase PPKS jenis ke } i \text{ yang ditangani}$ $n : \text{Jumlah jenis PPKS}$
3.	Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase Korban Bencana Alam/sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	$X_i = \frac{R_i}{S_i} \times 100\%$ $R_i : \text{Jumlah PPKS jenis ke-} i \text{ yang ditangani}$ $S_i : \text{Jumlah PPKS Kota jenis ke-} i \text{ yang ada}$ $X = \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.}$ $Y = \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah kota yang membutuhkan kebutuhan dasar/Perlindungan Sosial}$ $\text{Indikator kinerja} = \frac{X}{Y} \times 100\%$
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rata-Rata Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Sesuai Standar	Persen	Rata-rata persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, RW) yang Aktif (berdasarkan instrumen terdapat) dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, RW)



P. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Persen	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani dibagi Luas Total Kawasan Kumuh dikali seratus persen
3.	Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman	Persentase Capaian Penyediaan PSU Permukiman	Persen	Rata-rata persentase Rukun Warga (RW) yang difasilitasi oleh prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman.
4.	Penyediaan Rehabilitasi Perumahan Terdampak Bencana	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	Jumlah Rumah tidak Layak Huni korban bencana yang ditangani (direhab) dibagi jumlah total Rumah Tidak Layak Huni Terkena Bencana dikali seratus persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	Ket : Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun tertentu X / (t - 1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya	Point	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Peraturan RB Nomor 14 tahun 2017. (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)			
		Perangkat Daerah	Poin	Perangkat Daerah			
		Perangkat Daerah	Poin	Perangkat Daerah			
2.	Meningkatnya Stabilitas Pangan	Tingkat stabilitas harga pangan	%	CV = SD / M x 100% SD : standar deviasi harga pangan M : rata-rata harga pangan $sdev = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$			

R. DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai Lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi Kota	Rasio Konektivitas Wilayah	Persen	<p>trayek yang ada dibandingkan dengan jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yang dibutuhkan di Kota Cilegon.</p> $\frac{\text{Jumlah angkot yang aktif melayani trayek yang ada pada kabupaten/kota}}{\text{Jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yang dibutuhkan pada kabupaten/kota}} \times 100\%$
		Kinerja Lalu Lintas Jalan	Poin	<p>Tingkat pelayanan ruas jalan kota, yang diklasifikasikan menjadi 6, yaitu : Tingkat Pelayanan A sampai dengan Tingkat Pelayanan F</p> $= \frac{\text{volume lalu-lintas}}{\text{kapasitas jalan}}$

S. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	<div> <div>PENJELASAN</div> <div>FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN</div> </div>
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks Peringkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh AP/PP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lajap Perangkat Daerah	Poin	<p>Nilai lajap yang dinilai setiap tahun oleh AP/PP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)</p> <p>Pelayanan Ketertarikan dan keterlibatan umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penegakan Perda sesuai SOP;</li> <li>- Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar; dan</li> <li>- Pelaksanaan Penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar</li> </ul>
2.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM Tranbbum Linmas	Persen	

SYNOPSIS

U. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya tata kelola Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk yaitu Cakupan KK, KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon, Surat Keterangan Tempat Tinggal
		Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Persen	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil yaitu cakupan akta kelahiran usia 0-17 tahun, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian
		Persentase Validitas Data Kependudukan	Persen	Jumlah Data bermasalah yang Terverifikasi dibagi jumlah Data Bermasalah
		Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	Persen	Jumlah jenis data profil yang tersedia dibagi dengan jumlah jenis data yang seharusnya tersedia



V. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	Persen	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <p>Keterangan:            Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah            Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu            X(t-1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya</p>
2.	Meningkatnya penanganan kebakaran, penanggulangan bencana dan penyelamatan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap	Persen	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun n dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikalikan 100%
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh BALAKAR dalam tingkat waktu tanggap	Persen	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun n dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh BALAKAR dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikalikan 100%
		Persentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	Persen	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang terlayani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi dikalikan 100%

W. DINAS ...

W. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai LakiP. Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakiP yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Destinasi Pariwisata	Persentase realisasi destinasi wisata	Persen	Progres pembangunan destinasi pariwisata dihitung secara akumulatif : - Tahun ke-1 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 17% - Tahun ke-2 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 58 % - Tahun ke-3 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 71% - Tahun ke-4 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 80% - Tahun ke-5 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 100%
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun berjalan yang meliputi kunjungan pada hotel, restoran, wisata tirta (kolam renang), wisata agro dan wisata lainnya.
		Persentase SDM kepariwisataan ekonomi kreatif yang bersertifikat	Persen	$\left( \frac{\text{Jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat}}{\text{Jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada}} \times 100\% \right)$
		Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan	Even	Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun berjalan
		Persentase kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina	Persen	$\left( \frac{\text{Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina}}{\text{Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang ditargetkan ditahun n}} \times 100\% \right)$
		Persentase kajian sejarah yang dilakukan/jumlah kesejarahan yang ada	Persen	$\left( \frac{\text{Jumlah kajian sejarah yang dilakukan}}{\text{Jumlah kesejarahan yang ditargetkan ditahun n}} \times 100\% \right)$
		Persentase penetapan cagar budaya	Persen	$\left( \frac{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dalam SK}}{\text{Jumlah cagar budaya yang dikaji}} \times 100\% \right)$
		Progres pembangunan museum Daerah	Persen	Progres pembangunan museum daerah dihitung secara akumulatif : - Tahun ke-1 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 10% - Tahun ke-2 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 20 % - Tahun ke-3 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 60% - Tahun ke-4 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 100%

X. DINAS ...



X. DINAS KOPERASI DAN UKM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro yang difasilitasi dikali seratus persen

Y. DINAS ...

Y. DINAS TENAGA KERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	Persen	$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <p>Ket :</p> <p>Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah</p> <p>Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu</p> <p>X(t-1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya</p>
2.	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	Persen	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan/magang dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar

Z. DINAS ...

Z. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	Persen	$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <p>Ket :            Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah            X<sub>t</sub> = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu            X (t - 1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya</p>
2.	Meningkatnya peran perindustrian terhadap perluasan lapangan kerja	Persentase terselesaikannya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persen	Realisasi rencana pembangunan industry kota (RPIK) tahun n dibagi Target pembangunan tahun n dikali seratus persen.
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Industri kecil menengah	Persen	Jumlah Industri kecil menengah yang memiliki kesesuaian dokumen ijin usaha berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan dibagi jumlah industri kecil menengah yang diterbitkan ijin usaha dikali seratus persen.
		Persentase IKM yang terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n yang terdata dalam SIINAS dibagi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun n

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PEJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
3.	Meningkatnya Perdagangan	Persentase Relyat yang Sesuai Standar	Persen	Rata-Rata progres pasar rakyat yang direvitalisasi untuk ber-SNI
		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan / jumlah pelaku usaha di Kota Cillegon x 100% (Jml pelaku usaha/total modern+swalayan+pelaku usaha yg memiliki PDG)
4.	Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok	Tingkat stabilitas harga bahan pokok	Persen	<p>Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok (10 komoditas diluar beras).</p> <p>Formula : <math>CVI + CV2 + CV3 + \dots + CV10 / 10</math></p> <p><math>CVI = SD / M \times 100\%</math></p> <p>CV : koefisien variasi SD : standar deviasi M : mean/rata-rata I : komoditas ke-1, 1 = 1, 2, 3, ..., 10</p>

AA. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi Investasi	Triliun	Realisasi Investasi PMA + Realisasi PMDN Pada Tahun n (dalam Rupiah)  Ket. Data rilis dari BKPM

BB. DINAS ...

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN			
				Poin	Poin	Poin	Poin
1.	Mengukanya akuntabilitas pemerintah dan aparat	Indeks RB Peringkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengunggul 60%, hasil 40% (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	Nilai laci yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)		
		Peringkat Daerah					
2.	Mengukanya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) yang berwirausaha x 100% Jumlah pemuda yang ada di kota	Ket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi pemuda Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kependudukan</li> <li>- Data jumlah pemuda wirausaha dari peringkat daerah yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan</li> <li>- Data jumlah pemuda dari peringkat daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil</li> </ul>	
		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	Jumlah organisasi pemuda yang aktif x 100% Jumlah seluruh organisasi pemuda			
		Tingkat Prestasi Olahraga	Persen	Jumlah jenis pertandingan olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi x 100% Jumlah jenis pertandingan olahraga yang diikuti di tingkat Provinsi			
		Persentase Anggota Pramuka yang Aktif	Persen	Jumlah anggota pramuka yang aktif x 100% Jumlah anggota pramuka yang terdaftar			



OC. KECAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
				PENJELASAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah Nilai Laku Perangkit Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APF setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1) Nilai laku yang dinilai setiap tahun oleh APF dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia, maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1) Rumus = $X/Y \times 100\%$
2.	Mewujudkan Kelangkaan Bencana, kondusifitas Wilayah, Ketahanan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	Persen	X= Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test >= 70 dari nilai maksimal 100 (satuan nya : orang) pada kegiatan sosialisasi/bimtek tentang ideologi dan wawasan, karakter bangsa dan bela negara Y = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bimtek tentang ideologi dan wawasan, karakter bangsa dan bela negara Rumus = $X/Y \times 100\%$
		Persentase Gangguan Transibum yang diangani	Persen	Jumlah gangguan transibum yang dapat diangani (kasus) x 100% Jumlah gangguan transibum yang terjadi (kasus)
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	Rumus = $(2 \times X) / n \times 100\%$ X = Jumlah swadaya masyarakat di Kelurahan baik tingkat fisik ataupun non fisik di tahun ybs (Rp) Y = Jumlah total anggaran dana lingkungan (Rp) x 100% n = Kelurahan

WALI KOTA  
HECIDIY AGOSTIAN



PERANTARAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlandaskan pada

Nama : **TH. H. HENRI MARDIANA, SH., M.Si**  
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KOTA CILLEGON**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. HELDY AGUSTIAN, SH., SH., MH**  
Jabatan : **WALIKOTA CILLEGON**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

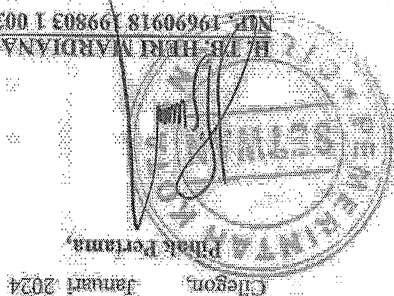
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**H. HELDY AGUSTIAN, SH., SH., MH**



**H. HENRI MARDIANA, SH., M.Si**  
NIP. 19690918 199803 1 003





LAMPIRAN PERANJANJENJARA  
SEKRETARIAT DPRD 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan stabilitas pemerintahan dan profesionalitas aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	66,57
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	65
		Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Poin	80

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

ANGGARAN

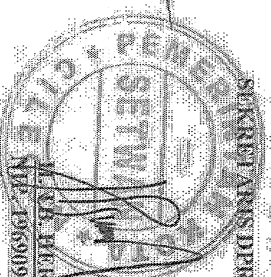
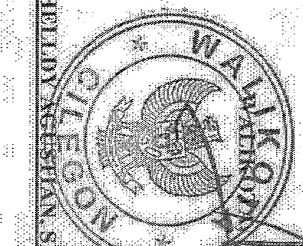
69.389.600.519

58.870.687.155

Total Anggaran:

128.260.287.674

H. HILDA NGESTIAN, S.P., SH., MH.



Cilégón, Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA CILEGON,

M. H. HENI MARDIANA  
NIP. 19690918.1998031.003